

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi terdapat dua jenis yaitu : organisasi privat dan organisasi publik. Organisasi privat atau profit bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, sedangkan organisasi publik bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Halim 2014:3).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya organisasi publik untuk mencapai tujuan organisasi maka harus bisa memberdayakan unsur-unsur yang ada dalam organisasi. Unsur-unsur tersebut adalah *man, money, material, machines, methods* dan *market*. Unsur-unsur tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Di era globalisasi sekarang ini, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka harus dipenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1). Akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; 2). Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) artinya masyarakat tidak hanya mengakses kebijakan melainkan ikut serta dalam proses dan perumusan kebijakan; 3) ketaatan pada hukum artinya seluruh kegiatan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dengan adil dan konsisten; dan

4). Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan (widodo 2014:1)

Upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdaya guna, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi berkaitan erat dengan mekanisme atau sistem kerja yang diterapkan dalam instansi bersangkutan. Mekanisme kerja yang digunakan tentunya sangat diharapkan dapat mencapai tujuan organisasi/instansi. Dalam hal pencairan anggaran belanja juga sangat dibutuhkan suatu mekanisme kerja yang tepat sehingga kegiatan pencairan anggaran belanja dalam suatu instansi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan instansi.

Pemerintah telah mengadakan perubahan yang lain tujuannya adalah untuk mencapaikan efektifitas dalam Manajemen Keuangan Negara, dan lebih khusus adalah dalam hal pencairan anggaran belanja. Perubahan atau reformasi yang dilakukan juga bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance and Clean Government*. Perubahan ini didukung dengan melakukan amandemen pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang ini harus dilaksanakan secara total oleh seluruh elemen yang terkait dalam manajemen keuangan Negara dari elemen tertinggi yaitu Presiden hingga elemen terendah seperti satuan kerja. Integrasi yang terjadi

dalam dokumen keuangan menuntut peningkatan akuntabilitas, transparansi, keakuratan, dan percepatan dalam hal tersebut di atas sangat dibutuhkan sumber daya, sistem dan perangkat yang professional dan memadai sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai amanat Undang-Undan.

Peraturan-peraturan pemerintah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan anggaran dan pengelola keuangan. Tata kelola keuangan yang baik merupakan elemen penting dalam pelaksanaan *Good Governance*. Elemen tata kelola keuangan tersebut meliputi antar lain penerapan sistem manajemen keuangan, sistem akuntansi keuangan, pengawasan dan audit keuangan, kelembagaan pengelolaan keuangan, regulasi dan sumber daya yang dimiliki standar kompetensi, profesionalisme, dan standar etika dalam pengelolaan keuangan. Jika semua elemen dalam kegiatan pengelolaan keuangan dapat melaksanakan peraturan-peraturan tersebut dengan baik, maka reformasi manajemen keuangan Negara yang bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance and Clean Government* akan segera tercapai.

Reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia mempunyai misi utama adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: pertama, meningkatkan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan). Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik pada pemerintah yang lebih rendah.

Persoalan pengelolaan (manajemen) keuangan meliputi aspek perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta pemeriksaan. Sehingga pelaksanaan pengelolaan (manajemen) keuangan tidak terjadi kontroversi dan penyimpangan. Pengelolaan keuangan di masa datang akan menghadapi tantangan yang semakin besar. Sumber-sumber pendapatan ini menjadi andalan penerimaan Negara suatu saat mungkin berkurang bahkan habis. Untuk itu diperlukan paradigma pengelolaan keuangan yang bervisi ke depan yang tidak sekadar berpikir secara konvensional, atau melanjutkan kebiasaan yang sudah berjalan.

Sejalan dengan itu, birokrasi pemerintah juga perlu melakukan reposisi, revitalisasi dan redesain agar mampu menjawab tantangan perubahan dan mampu menjadi pemenang dalam kompetisi global. Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik terbaik dan mewujudkan masyarakat sejahtera. Pemberian pelayanan publik yang berkualitas memang membutuhkan biaya yang tidak murah, tetapi dengan manajemen keuangan daerah yang optimal maka ketersediaan pelayanan publik yang murah dan berkualitas bukan hal yang tidak mungkin. Optimalisasi manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada peningkatan volume pendapatan semata, sebab peran pemerintah melalui pendapatan saja tidak mampu mengatasi semua permasalahan negara. Pemerintah semestinya tidak hanya berorientasi untuk meningkatkan anggaran setinggi-tingginya, tetapi yang lebih utama adalah mengoptimalkan tata kelola keuangan yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan masih sangat diperlukan pengayaan referensi dan riset di bidang manajemen keuangan sebagai acuan dan paduan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pengelola keuangan.

Untuk menunjang manajemen keuangan dengan baik maka diperlukan asas-asas pengelolaan keuangan negara yaitu : 1). Asas kesatuan, asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran; 2). Asas universalitas, asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran; 3). Asas tahunan, asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu; 4). Asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya; selain itu terdapat asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara : 1). Akuntabilitas berorientasi pada hasil; 2). Profesionalitas; 3). Proporsionalitas; 4). Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; 5). Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. (Sancoko 2013:7)

Manajemen keuangan yang baik didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya manusia merupakan sumber kekuatan untuk menggerakkan roda aktivitas organisasi sehingga menjadi tujuan organisasi terwujud. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus anggota dalam organisasi, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia dalam

pengelolaan keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam berjalannya organisasi.

Pengelolaan keuangan pada Universitas Tanjungpura pada saat ini sudah menerapkan sistem satu pintu. Sistem satu pintu artinya segala penerimaan dan pengeluaran di bawah satu kendali, yaitu Universitas Tanjungpura sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Universitas Tanjungpura akan dilaksanakan oleh fakultas-fakultas di bawahnya. Pada tingkat fakultas terdiri dari prodi-prodi dan program Diploma III, Program Reguler B serta Megister.

Namun demikian juga yang terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sebagai unit di bawah satuan kerja Universitas Tanjungpura yang mengemban fungsi menyusun rumusan kebijakan teknis administrasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih berada pada tahan reformasi administrasi. Perencanaan merupakan dasar dari berjalannya organisasi. Penyusunan anggaran untuk merencanakan tahun berikutnya haruslah dipersiapkan mulai dari tahun sekarang, penyusunan anggaran tersebut meliputi semua elemen di fakultas baik dari bagian kemahasiswaan, perlengkapan, kepegawaian, prodi-prodi, pengelola Reguler B, Pengelola Diploma III serta Magister. Keterlibatan semua elemen di fakultas untuk menyusun anggaran sangatlah diharapkan untuk tercapainya tujuan dari visi dan misi fakultas.

Oleh karena itu penyusunan perencanaan diperlukan keseriusan dalam menangani perencanaan tersebut, dari tahun ke tahun perencanaan di Fisip

hanya mengcopy tahun yang lalu, hal tersebut terjadi karena waktu yang diberikan untuk menyerahkan ke Universitas Tanjungpura sangat singkat, dan kesiapan untuk menyusun anggaran dari tahun ke tahun tidak dilakukan sehingga pada saatnya penyusunan anggaran hasil dari penyusunan anggaran hasilnya apa adanya.

Dalam penyusunan perencanaan anggaran sangat diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perencanaan anggaran, memahami peraturan tentang perencanaan penganggaran. Tetapi pada kenyataannya penyusunan perencanaan di Fisip yang semestinya disusun oleh tim perencanaan dilakukan oleh staf keuangan, sedangkan data yang seharusnya diperoleh dari bagian/prodi tidak diperoleh guna mendukung penyusunan perencanaan. Table berikut realisasi anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Tabel 1.1

**Realisasi Penerimaan dan pengeluaran
Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun 2012-2014**

No	Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Selisih	% tase daya serap
1	2012	21.123.685.328,-	13.749.562.248,-	7.374.123.080,-	65%
2	2013	20.173.837.330,-	11.324.467.550,-	8.849.396.780,-	56%
3	2014	22.590.348.410,-	21.112.273.380,-	1.478.075.030,-	93%

Sumber data: Bagian Keuangan Fisip Untan 2014

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat jelas bahwa terdapat selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari tahun 2012-2014. Pada tahun 2012

daya serap anggaran di Fisip Untan adalah 65% dari dana penerimaan. Sedangkan tahun 2013 daya serap anggaran mencapai 53% dari dana penerimaan, ada penurunan daya serap pada tahun 2013, pada dua tahun tersebut pembangunan fisik (gedung) sebagai sarana perkuliahan belum nampak. Pada tahun 2014 daya serap anggaran mengalami peningkatan.

Hal ini tentu saja menjadi fokus kajian yang menarik untuk diteliti dikarenakan bahwa perencanaan adalah suatu yang sangat penting dalam organisasi.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas secara umum yang menjadi permasalahan dalam Pelaksanaan Pengelolaan PNBП Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura masih banyak yang belum terealisasi dengan baik. Berbagai fenomena masih dijumpai seperti:

1. Lemahnya persiapan dan penyusunan perencanaan anggaran
2. Daya serap anggaran dalam operasional pendidikan masih belum maksimal

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memfokuskan penelitian pada: “Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura ditinjau dari tahap siklus anggaran”.

Tahap siklus anggaran tersebut adalah:

1. Tahap persiapan dan perencanaan anggaran
2. Tahap Ratifikasi anggaran
3. Tahap Pelaksanaan anggaran
4. Tahap Pelaporan Anggaran

1.4. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan fokus penelitian dan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang disajikan dengan maksud untuk memperjelas sasaran yang terdapat dalam penelitian ini. Maka dari itu perumusan masalah ini adalah : “Bagaimana Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ditinjau dari tahap siklus anggaran?”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fisip Untan adalah : untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran PNBP Fisip Untan ditinjau dari tahap siklus anggaran?

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berguna mengenai pengelolaan PNBP Fisip Untan, serta dapat dijadikan sumber/referensi ilmiah Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak serta literatur sumbangan bagi para peneliti.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.